

# Hasil Laporan Evaluasi Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2016

Penilaian		Penjelasan	Jawaban	Nilai	Presentase (Bobot / Nilai)	Nama/ Nomor Dokumen Pendukung
<b>A. PROSES (60).</b>				<b>53.65</b>	<b>89.41%</b>	
<b>I.Manajemen Perubahan</b>				<b>4.82</b>	<b>96.48%</b>	
<b>1. Tim Reformasi Birokrasi</b>				<b>1</b>	<b>100%</b>	
a	Tim Reformasi Birokrasi telah dibentuk	a. Telah membentuk Tim Reformasi Birokrasi sesuai kebutuhan organisasi b. Telah membentuk Tim Reformasi Birokrasi namun belum sesuai kebutuhan organisasi c. Belum membentuk Tim Reformasi Birokrasi	A	1		Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 267 Tahun 2015 tanggal 8 Mei 2015 tentang Pembentukan Tim Kelompok Kerja Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Yogyakarta
b	Tim Reformasi Birokrasi telah melaksanakan tugas sesuai rencana kerja Tim Reformasi Birokrasi	a. Seluruh tugas telah dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi sesuai dengan rencana kerja b. Sebagian besar tugas telah dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi sesuai dengan rencana kerja c. Sebagian kecil tugas telah dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi sesuai dengan rencana kerja d. Seluruh tugas belum dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi sesuai dengan rencana kerja	A	1		laporan hasil capaian pelaksanaan tugas tim RB
c	Tim Reformasi Birokrasi telah melakukan monitoring dan evaluasi rencana kerja, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti	a. Seluruh rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti b. Sebagian besar rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti c. Sebagian kecil rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti d. Seluruh rencana kerja belum dimonitoring dan di evaluasi	A	1		laporan hasil monitoring dan evaluasi
<b>2. Road Map Reformasi Birokrasi</b>				<b>0.93</b>	<b>93.4%</b>	
a	Road Map telah disusun dan diformalkan	Road Map telah disusun dan ditetapkan sebagai dokumen formal	Ya	1		Keputusan Walikota Yogyakarta No. 406/KEP/2013 ttg Penetapan Road Map RB Th. 2012 s/d 2016 di Lingkungan Pemkot Yk.
b	Road Map telah mencakup 8 area perubahan	a. 4 area atau lebih b. 1-3 area c. tidak ada	A	1		Keputusan Walikota Yogyakarta No. 406/KEP/2013 ttg Penetapan Road Map RB th. 2012 s/d 2016 di lingkungan Pemkot Yk.

	c	Road Map telah mencakup "quick win"	a. Quick win ada sesuai dengan ekspektasi dan dapat diselesaikan dalam waktu cepat b. Quick win ada tapi tidak sesuai dengan ekspektasi atau tidak dapat diselesaikan dalam waktu cepat c. Belum ada quick win	A	1		Keputusan Walikota Yogyakarta No. 406/KEP/2013 ttg Penetapan Road Map RB th. 2012 s/d 2016 di lingkungan Pemkot Yk.
	d	Penyusunan Road Map telah melibatkan seluruh unit organisasi	a. Seluruh unit organisasi telah dilibatkan dalam penyusunan Road Map b. Sebagian besar unit organisasi telah dilibatkan dalam penyusunan Road Map c. Sebagian kecil unit organisasi telah dilibatkan dalam penyusunan Road Map d. Belum ada organisasi yang dilibatkan dalam penyusunan Road Map	B	0.67		SK Tim Keseluruhan dan notulen
	e	Telah terdapat sosialisasi/internalisasi Road Map kepada anggota organisasi	a. Seluruh anggota organisasi telah mendapatkan sosialisasi dan internalisasi Road Map b. Sebagian besar anggota organisasi telah mendapatkan sosialisasi dan internalisasi Road Map c. Sebagian kecil anggota organisasi telah mendapatkan sosialisasi dan internalisasi Road Map d. Seluruh anggota organisasi belum mendapatkan sosialisasi dan internalisasi Road Map	A	1		sosialisasi dilakukan bersamaan dg Bimtek agen of change dilaksanakan tanggal 28 Oktober 2014, workshop agents of change RB dengan tema hospitality management pegawai Pemerintah kota Yk tanggal 9-10 Juni 2015
<b>3. Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi</b>					2	100%	
	a	PMPRB telah direncanakan dan diorganisasikan dengan baik	a. Seluruh PMPRB telah direncanakan dan diorganisasikan dengan baik b. Sebagian besar PMPRB telah direncanakan dan diorganisasikan dengan baik c. Sebagian kecil PMPRB telah direncanakan dan diorganisasikan dengan baik d. Seluruh PMPRB belum direncanakan dan diorganisasikan dengan baik	A	1		Kepwal No. 156 th 2015 ttg Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan PMPRB pada Inspektorat Kota Yogyakarta, Dokumen tatakala kegiatan PMPRB
	b	Aktivitas PMPRB telah dikomunikasikan pada masing-masing unit kerja	a. Seluruh aktivitas PMPRB telah dikomunikasikan pada masing-masing unit organisasi b. Sebagian besar aktivitas PMPRB telah dikomunikasikan pada masing-masing unit organisasi c. Sebagian kecil aktivitas PMPRB telah dikomunikasikan pada masing-masing unit organisasi d. Seluruh aktivitas PMPRB belum dikomunikasikan pada masing-masing unit organisasi	A	1		Notulen rapat koordinasi persiapan pelaksanaan PMPRB, rapat koordinasi melibatkan seluruh SKPD/ unit kerja pengampu 8 area perubahan dalam RB
	c	Telah dilakukan pelatihan yang cukup bagi Tim Asesor PMPRB	a. Seluruh Tim Asesor PMPRB telah mendapatkan pelatihan b. Sebagian besar Tim Asesor PMPRB telah mendapatkan pelatihan c. Sebagian kecil Tim Asesor PMPRB telah mendapatkan pelatihan d. Seluruh Tim Asesor PMPRB belum mendapatkan pelatihan	A	1		notulen inspektorat, FGD tim inspektorat
	d	Pelaksanaan PMPRB dilakukan oleh Asesor sesuai dengan ketentuan yang berlaku	a. Terdapat penunjukan keikutsertaan pejabat struktural lapis kedua sebagai asesor PMPRB dan yang bersangkutan terlibat sepenuhnya sejak tahap awal hingga akhir proses PMPRB. b. Terdapat penunjukan keikutsertaan pejabat struktural lapis kedua sebagai asesor PMPRB, tetapi partisipasinya tidak meliputi seluruh proses PMPRB. c. Terdapat penetapan pejabat struktural lapis kedua sebagai asesor PMPRB, tetapi fungsi asesor dari unit tersebut dilakukan oleh pegawai lain d. Partisipasi pejabat struktural lapis kedua sebagai asesor PMPRB belum ada.	A	1		Kepwal No. 156 th 2015 ttg Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan PMPRB pada Inspektorat Kota Yogyakarta, Dokumen tatakala kegiatan PMPRB
	e	Apakah koordinator asesor PMPRB melakukan reviu terhadap kertas kerja asesor sebelum menyusun kertas kerja instansi?	a. Koordinator asesor telah melakukan reviu terhadap seluruh kertas kerja sebelum menyusun kertas kerja instansi b. Koordinator asesor telah melakukan reviu terhadap sebagian kertas kerja sebelum menyusun kertas kerja instansi c. Koordinator asesor belum melakukan reviu kertas kerja sebelum menyusun kertas kerja instansi	A	1		Kertas kerja reviu hasil evaluasi pelaksanaan RB th 2015
	f	Apakah para asesor mencapai konsensus atas pengisian kertas kerja sebelum menetapkan nilai PMPRB instansi?	a. Mayoritas koordinator asesor mencapai konsensus dan seluruh kriteria dibahas b. Tidak seluruh koordinator asesor mencapai konsensus dan/atau tidak seluruh kriteria dibahas; c. Belum ada konsensus yang dicapai oleh para koordinator asesor	A	1		Berita acara hasil verifikasi penilaian RB
	g	Rencana aksi tindak lanjut (RATL) telah dikomunikasikan dan dilaksanakan	a. Terdapat Rencana Aksi dan Tindak Lanjut (RATL) yang telah dikomunikasikan dan dilaksanakan b. Terdapat Rencana Aksi dan Tindak Lanjut (RATL) namun belum dikomunikasikan dan dilaksanakan c. Belum terdapat Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL)	A	1		Laporan hasil evaluasi dan TL RB, hasil monev RB, rapat koordinasi evaluasi : notulen, undangan

4. Perubahan pola pikir dan budaya kinerja					0.89	89%	
a	Terdapat keterlibatan pimpinan tertinggi secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi	a. seluruh jajaran pimpinan tertinggi terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi b. sebagian besar pimpinan tertinggi terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi c. sebagian kecil pimpinan tertinggi terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi d. Seluruh jajaran pimpinan tertinggi belum terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi	B	0.67		Perwal budaya pemerintahan 58 tahun 2015 tentang budaya pemerintahan di Pemerintah Kota Yogyakarta, setiap SKPD mempunyai kelompok kerja budaya pemerintahan, SE Nomor : 130/87/SE/2015 tentang budaya pemerintahan. sudah 70% SKPD yang membuat.	
b	Terdapat media komunikasi secara reguler untuk menyosialisasikan tentang reformasi birokrasi yang sedang dan akan dilakukan	a. Ada media komunikasi yang cakupannya menjangkau seluruh pegawai dan pemangku kepentingan terkait serta dilaksanakan secara berkala b. Ada media komunikasi yang cakupannya menjangkau seluruh pegawai dan pemangku kepentingan terkait c. Ada media komunikasi yang cakupannya menjangkau seluruh pegawai d. Ada media komunikasi namun cakupannya terbatas pada pegawai tingkatan tertentu e. Belum ada media komunikasi untuk mensosialisasikan pelaksanaan reformasi birokrasi	A	1		rapat dinas, rapat terbatas, Bimtek RB, dimasukkan web jogjakota.go.id sub domain organisasi@jogjakota.go.id	
c	Terdapat upaya untuk menggerakkan organisasi dalam melakukan perubahan melalui pembentukan agent of change ataupun role model	a. Sudah terdapat upaya pembentukan Agent of Change secara formal dan sesuai ukuran organisasi, dan sudah mengikuti pelatihan sebagai role model dalam perubahan b. Sudah terdapat upaya pembentukan Agent of Change secara formal dan sesuai ukuran organisasi c. Sudah terdapat upaya pembentukan Agent of Change namun secara formal belum dilakukan d. Belum ada upaya untuk membentuk Agent of Change	A	1		Perwal Nomor 76 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi dan Kepwal Nomor 441 Tahun 2014 tentang Pembentukan Agen perubahan Reformasi Birokrasi dan telah dilakukan pelatihan Agent of Change bagi SKPD pada bulan Agustus 2014	
<b>Rencana Aksi</b>		Melanjutkan kegiatan sosialisasi, Penyegaran Reformasi Birokrasi , Pelatihan agent of change					
<b>II.PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>					3.34	66.75%	
<b>1. Harmonisasi</b>					1.88	75%	
a	Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron	a. Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron b. Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap sebagian peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron c. Belum dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron	A	1		Dokumen hasil pemetaan Perda dan inventarisasi Perwal	
b	Telah dilakukan revisi peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis / tidak sinkron	a. Revisi atas peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis / tidak sinkron telah selesai dilakukan, atau tidak ditemukan adanya peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis b. Upaya revisi atas peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis / tidak sinkron telah dilakukan, namun belum selesai c. Belum dilakukan upaya revisi atas peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis / tidak sinkron	B	0.5		Data rekapitulasi produk hukum daerah yang telah dilakukan harmonisasi dan Kesepakatan Prolegda Tahun 2015	
<b>2. Sistem pengendalian dalam penyusunan peraturan perundang-undangan</b>					1.46	58.5%	
a	Adanya Sistem pengendalian penyusunan peraturan perundangan yang mensyaratkan adanya Rapat Koordinasi, Naskah Akademis/kajian/policy paper, dan Paraf Koordinasi	a. Seluruh persyaratan lengkap dan diimplementasikan b. Ada persyaratan tersebut namun baru sebagian diimplementasikan c. Ada persyaratan tersebut namun belum diimplementasikan d. Belum ada persyaratan tersebut	B	0.67		SOP produk hukum Bagian Hukum Nomor .... , Contoh dokumen proses peraturan perundangan dan notulen rapat pembahasan	

	b	Telah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan	a. Evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan dilakukan secara berkala b. Evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan dilakukan secara tidak berkala c. Belum pernah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan	B	0.5		Data hasil evaluasi
	<b>Rencana Aksi</b>		1. Menuntaskan identifikasi peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis /tidak sinkron selain Peraturan Daerah 2. Menyusun perwal penyusunan produk hukum daerah 3. Membuat instrument proses kendali penyusunan produk hukum daerah al. penerapan routing slip				
<b>III.PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI</b>					6	100%	
<b>1. Evaluasi</b>					3	100%	
	a	Telah dilakukan evaluasi yang bertujuan untuk menilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi	a. Telah dilakukan evaluasi untuk menilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi kepada seluruh unit organisasi b. Telah dilakukan evaluasi untuk menilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi kepada sebagian unit organisasi c. Belum dilakukan evaluasi untuk menilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi kepada unit organisasi	A	1		draft raperda SOTK, draft raperda hasil kesepakatan legislatif dan eksekutif (ULP,Satpol PP,Dinas Kebudayaan,Dinas Pariwisata),mapping uraian tugas pada 49 SKPD, dan evaluasi kelembagaan melalui SPeKop, dokumen hasil evaluasi
	b	Telah dilakukan evaluasi yang mengukur jenjang organisasi	a. Telah dilakukan evaluasi yang mengukur jenjang organisasi kepada seluruh unit organisasi b. Telah dilakukan evaluasi yang mengukur jenjang organisasi kepada sebagian unit organisasi c. Belum dilakukan evaluasi yang mengukur jenjang organisasi kepada unit organisasi	A	1		perubahan rintug, hasil anjab, hasil evaluasi kelembagaan, ukuran dasar pembentukan kelembagaan
	c	Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan duplikasi fungsi	a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan duplikasi fungsi kepada seluruh unit kerja b. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan duplikasi fungsi kepada sebagian unit kerja c. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan duplikasi fungsi kepada unit kerja	A	1		Dokumen Hasil Evaluasi Kelembagaan, laporan tahunan evaluasi kelembagaan, draft perwal rincian tugas, hasil mapping tupoksi
	d	Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis satuan organisasi yang berbeda tujuan namun ditempatkan dalam satu kelompok	a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis satuan organisasi yang berbeda tujuan namun ditempatkan dalam satu kelompok kepada seluruh unit kerja b. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis satuan organisasi yang berbeda tujuan namun ditempatkan dalam satu kelompok kepada sebagian unit kerja c. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis satuan organisasi yang berbeda tujuan namun ditempatkan dalam satu kelompok kepada unit kerja	A	1		Dokumen Hasil Evaluasi Kelembagaan, laporan tahunan evaluasi kelembagaan, draft perwal rincian tugas, hasil mapping tupoksi
	e	Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan	a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan kepada seluruh unit kerja b. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan kepada sebagian unit kerja c. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan kepada unit kerja	A	1		Hasil evaluasi implementasi Perwal 57 th 2013
	f	Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan	a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan kepada seluruh unit kerja b. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan kepada sebagian unit kerja c. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan kepada unit kerja	A	1		Dokumen Hasil Analisis Beban Kerja, dokumen hasil evaluasi kelembagaan, draft perda kelembagaan
	g	Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian struktur organisasi dengan mandat	a. Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian struktur organisasi dengan mandat kepada seluruh unit kerja b. Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian struktur organisasi dengan mandat kepada sebagian unit kerja c. Belum dilakukan evaluasi atas kesesuaian struktur organisasi dengan mandat kepada unit kerja	A	1		Dokumen Hasil Evaluasi Kelembagaan. Contoh : perda kelembagaan BPBD, draft perda satpol PP

	h	Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan tumpang tindih fungsi dengan instansi lain	Ya, apabila telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan tumpang tindih fungsi dengan instansi lain	Ya	1		Hasil evaluasi rincian tugas/tupoksi dilaksanakan di seluruh SKPD (49 SKPD/Unit kerja) dengan hasil perlu merubah tupoksi SKPD. Adapun hasil produk hukum kelembagaan sbb : 1. Perwal Kota Yk no. 28 th. 2015 ttg Tupoksi Rincian Tugas & Tata Kerja Kantor Pengelolaan Taman Pintar Kota Yk 2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2015
	i	Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemampuan struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis	Ya, apabila telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemampuan struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis	Ya	1		Dokumen Hasil Evaluasi Kelembagaan.
<b>2. Penataan</b>					<b>3</b>	<b>100%</b>	
	a	Hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi	a. Seluruh hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi b. Sebagian besar hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi c. Sebagian kecil hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi d. Seluruh hasil evaluasi belum ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi	A	1		draft raperda SOTK, draft raperda hasil kesepakatan legislatif dan eksekutif, mapping uraian tugas pada 49 SKPD, dan evaluasi kelembagaan melalui SPEKop
<b>Rencana Aksi</b>			Menuntaskan evaluasi kelembagaan dan tugas fungsi terhadap seluruh organisasi, evaluasi difokuskan pada ukuran organisasi rentan struktur organisasi, pola pertanggung jawaban, kemampuan organisasi mencapai tujuan.				
<b>IV.PENATAAN TATALAKSANA</b>					<b>4.63</b>	<b>92.5%</b>	
<b>1. Proses bisnis dan prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama</b>					<b>1.13</b>	<b>75%</b>	
	a	Telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi	a. Seluruh unit organisasi telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi b. Sebagian besar unit organisasi telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi c. Sebagian kecil unit organisasi telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi d. Seluruh unit organisasi belum memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi	C	0.33		dokumen peta proses bisnis / mekanisme kerja. Perwal pedoman penyusunan tatalaksana, SE Nomor 060/...., Workshop, Keputusan kepala SKPD tentang penetapan proses bisnis
	b	Peta proses bisnis sudah dijabarkan ke dalam prosedur operasional tetap (SOP)	a. Seluruh peta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOP b. Sebagian besar peta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOP c. Sebagian kecil peta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOP d. Seluruh peta proses bisnis belum dijabarkan dalam SOP	B	0.67		inventarisasi SOP yang telah ditetapkan SKPD,
	c	Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan	a. Seluruh unit organisasi telah menerapkan Prosedur operasional tetap (SOP) b. Sebagian besar unit organisasi telah menerapkan Prosedur operasional tetap (SOP) c. Sebagian kecil unit organisasi telah menerapkan Prosedur operasional tetap (SOP) d. Seluruh unit organisasi belum menerapkan Prosedur operasional tetap (SOP)	A	1		inventarisasi SOP yang telah ditetapkan SKPD
	d	Peta proses bisnis dan Prosedur operasional telah dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan tuntutan efisiensi, dan efektivitas birokrasi	a. Terdapat evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan SOP secara berkala dan seluruh hasilnya telah ditindaklanjuti b. Terdapat evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan SOP secara berkala namun belum seluruh hasilnya ditindaklanjuti c. Terdapat evaluasi namun belum menganalisis efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan SOP d. Belum ada evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan prosedur operasional	A	1		Dokumen hasil evaluasi SOP, al. sudah dievaluasi draft 3 SKPD pada waktu workshop, Revisi SOP hasil evaluasi
<b>2. E-Government</b>					<b>2</b>	<b>100%</b>	
	a	Sudah memiliki rencana pengembangan e-government di lingkungan instansi	Ya, apabila sudah memiliki rencana pengembangan e-government di lingkungan instansi	Ya	1		perwal nomor 15 tahun 2015 ttg E-Government

	b	Sudah dilakukan pengembangan e-government di lingkungan internal dalam rangka mendukung proses birokrasi (misal: intranet, sistem perencanaan dan penganggaran, sistem data base SDM, dll)	a. Sudah dilakukan implementasi pengembangan e-government secara terintegrasi b. Sudah dilakukan implementasi pengembangan e-government namun belum terintegrasi c. Sudah dilakukan pengembangan e-government namun belum dilakukan implementasi d. Belum ada pengembangan dan implementasi e-government	A	1		uji coba e-office berdasar Perwal no 7 th 2009, perbaikan tampilan website jogjakota.go.id dan aplikasi e-organisasi, SE Nomor 065/53/SE/2013 tentang pra uji coba pelaksanaan TNDE, SE nomor 61/2013 optimalisasi penggunaan TNDE, integrasi sistem perencanaan dengan anggaran
	c	Sudah dilakukan pengembangan e-government untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat (misal: website untuk penyediaan informasi kepada masyarakat, sistem pengaduan)	a. Sudah dilakukan implementasi pengembangan e-government secara terintegrasi b. Sudah dilakukan implementasi pengembangan e-government namun belum terintegrasi c. Sudah dilakukan pengembangan e-government namun belum dilakukan implementasi d. Belum ada pengembangan dan implemetasi e-government	A	1		uji coba e-office berdasar Perwal no 7 th 2009, perbaikan tampilan website jogjakota.go.id dan aplikasi e-organisasi
	d	Sudah dilakukan pengembangan e-government untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam tingkatan transaksional (masyarakat dapat mengajukan perijinan melalui website, melakukan pembayaran, dll)	a. Sudah dilakukan implementasi pengembangan e-government secara terintegrasi b. Sudah dilakukan implementasi pengembangan e-government namun belum terintegrasi c. Sudah dilakukan pengembangan e-government namun belum dilakukan implementasi d. Belum ada pengembangan dan implemetasi e-government	A	1		web pajak (PBB), web dinzin , layanan akte online
<b>3. Keterbukaan Informasi Publik</b>					1.5	100%	
	a	Adanya kebijakan pimpinan tentang keterbukaan informasi publik (identifikasi informasi yang dapat diketahui oleh publik dan mekanisme penyampaian)	Ya, apabila telah ada kebijakan pimpinan tentang keterbukaan informasi publik	Ya	1		Keputusan Sekretaris Daerah nomor 48 / Sekda / 2014 tentang Daftar Informasi Publik dan Informasi yang dikecualikan di Pemerintah Kota Yogyakarta diperbarui dengan keputusan sekda 19 tahun 2015, Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 335 / KEP/ 2013 tentang Penunjukan PPID
	b	Menerapkan kebijakan keterbukaan informasi publik	a. Seluruh informasi publik telah dapat diakses b. Sebagian besar informasi publik telah dapat diakses c. Sebagian kecil informasi publik telah dapat diakses d. Seluruh informasi publik belum dapat diakses	A	1		dapat diakses melalui website Pemkot YK, kep. Sekda, masuk di sub domain. penyempurnaan tampilan, web jogjakota.go.id
	c	Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	a. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dilakukan secara berkala b. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dilakukan tidak berkala c. Belum ada monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	A	1		dilaksanakan triwulanan, direncanakan tahun 2016 FGD tahunan, perubahan aplikasi
	<b>Rencana Aksi</b>		Menyempurnakan peta proses bisnis				
<b>V. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM (15)</b>					12.91	86.05%	
	<b>1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi</b>				1	100%	

	a	Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah dilakukan	a. Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah dilakukan kepada seluruh jabatan b. Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah dilakukan kepada sebagian besar jabatan c. Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah dilakukan kepada sebagian kecil jabatan d. Analisis jabatan dan analisis beban kerja belum dilakukan	A	1	Kepwal/draft kepal hasil anjab th 2015 atas 48 SKPD terdiri atas: a. Sembilan Kepwal (Dinas Kesehatan, UPT Pratama, Dinsosnakertrans, DinPerindagkoptan, RSUD, Kantor KB, Kantor Arpusda, KPMP, KPTP) b. Delapan Draft Kepwal (Kecamatan dan Kelurahan, Dinas Kimpraswil, DPDPK, Dinas Pariwisata, Dinas Ketertiban, Dindukcapil, BKD dan Inspektorat) Kepwal Kecamatan Kelurahan terdiri dari 14 Kecamatan dan 45 Kelurahan.
	b	Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan	a. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan kepada seluruh unit organisasi b. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan kepada sebagian besar unit organisasi c. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan kepada sebagian kecil unit organisasi d. Perhitungan kebutuhan pegawai belum dilakukan	A	1	Dokumen hasil anjab th 2015 , Data/rekap Perhitungan kebutuhan pegawai atas 48 SKPD; jumlah kebutuhan seluruh pegawai : 11.681 Orang
	c	Rencana redistribusi pegawai telah disusun dan diformalkan	ya, apabila terdapat dokumen rencana redistribusi pegawai	Ya	1	Dokumen Rencana redistribusi pegawai , namun masih sebatas pejabat struktural dalam bentuk : - inventarisir data/nama yg akan diinventarisir - Pengantar surat - Atas dasar database yg lebih 5 th dan atas usul dari SKPD - Sebagai bahan rapat Baperjakat
	d	Proyeksi kebutuhan 5 tahun telah disusun dan diformalkan	ya, apabila terdapat dokumen tentang proyeksi kebutuhan 5 tahun	Ya	1	"Surat Walikota kepada BKN dan Menpan RB perihal hasil penyusunan perenc kebutuhan peg No 800/753 tanggal 10 maret 2015 proyeksi kebutuhan/ formasi pegawai untuk 5 tahun; dari tahun 2015 ke tahun 2019 alokasi kebutuhan sbb : (1) Tahun 2015 : 4471 (2) Tahun 2016 : 4593 (3) Tahun 2017 : 4856 (4) Tahun 2018 : 5160 (5) Tahun 2019 : 5529
	e	Perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama instansi telah dihitung dan diformalkan	a. Perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama instansi telah dihitung dan diformalkan pada seluruh unit organisasi b. Perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama instansi telah dihitung dan diformalkan pada sebagian besar unit organisasi c. Perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama instansi telah dihitung dan diformalkan pada sebagian kecil unit organisasi d. Perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama instansi telah dihitung dan diformalkan belum dilakukan	A	1	Surat Walikota kepada BKN dan Menpan RB perihal hasil penyusunan perenc kebutuhan peg No 800/753 tanggal 10 maret 2015 proyeksi kebutuhan/ formasi pegawai untuk 5 tahun; dari tahun 2015 ke tahun 2019 alokasi kebutuhan sbb : (6) Tahun 2015 : 4471 (7) Tahun 2016 : 4593 (8) Tahun 2017 : 4856 (9) Tahun 2018 : 5160 (10) Tahun 2019 : 5529
<b>2. Proses penerimaan pegawai transparan, objektif, akuntabel dan bebas KKN</b>					<b>2</b>	<b>100%</b>

	a	Pengumuman penerimaan diinformasikan secara luas kepada masyarakat	a. Pengumuman penerimaan disebarluaskan melalui berbagai media (misal: website, jejaring sosial, dsb) b. Pengumuman penerimaan diinformasikan melalui media secara terbatas (misal: papan pengumuman di kantor) c. Pengumuman penerimaan belum disebarluaskan	A	1		Printscreen media/jejaring sosial yang memuat Pengumuman Ketua Tim Pengadaan CPNS Pemkot Yk Tahun 2014 Nomor 800/3278 tgl 1 September 2014 ttg Pengadaan CPNS dari Pelamar Umum Pemerintah Kota Yk Th 2014
	b	Pendaftaran dapat dilakukan dengan mudah, cepat dan pasti (online)	Ya, apabila pendaftaran dapat dilakukan secara online dan dapat segera diperoleh informasi mengenai kepastian status pendaftaran.	Ya	1		Printscreen fitur web yang menampilkan blanko pendaftaran dapat dilakukan secara online dan dapat segera diperoleh informasi mengenai kepastian status pendaftaran Blangko Registrasi Pendaftaran CPNS
	c	Persyaratan jelas, tidak diskriminatif	Ya, apabila terdapat kejelasan persyaratan administrasi dan kompetensi. Persyaratan memberikan kesempatan luas kepada masyarakat.	Ya	1		Printscreen web/copy Naskah dinas yang memuat persyaratan administrasi dan kompetensi; persyaratan memberikan kesempatan luas kepada masyarakat termuat di Pengumuman
	d	Proses seleksi transparan, objektif, adil, akuntabel dan bebas KKN	Ya, apabila proses seleksi jelas kriteria dan prosesnya, tidak terjadi KKN, dan dapat dipertanggungjawabkan.	Ya	1		Dokumen adanya komitmen atau berita acara penggunaan CAT antara user (Pemkot Yk) dengan vendor/provider (BKN) untuk pengadaan tahun 2010 Perjanjian Kerjasama antara Pemkot dan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yk nomor 01/SPK/CPNS/2014 tanggal 25 september 2014
	e	Pengumuman hasil seleksi diinformasikan secara terbuka	Ya, apabila Pengumuman hasil seleksi dapat diakses oleh publik dengan mudah	Ya	1		Printscreen web yang memuat Pengumuman hasil seleksi Dimuat di Jawa Pos dan Tribun Jogja tanggal 12 Desember 2014, Web Pemkot serta di papan pengumuman BKD
<b>3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi</b>					0.89	89%	
	a	Telah ada standar kompetensi jabatan	Ya, apabila terdapat kebijakan tentang tentang kompetensi jabatan	Ya	1		Naskah dinas draft dok standar kompetensi selesai 80% 1. Perwal No.97 Tahun 2010 tentang Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pemkot Yk 2. Perwal No.45 Tahun 2015 tentang Standar Kompetensi Manajerial JPT Pratama Pemkot Yk

	b	Telah dilakukan <i>assessment</i> pegawai	<p>a. Telah dilakukan <i>assessment</i> kepada seluruh pegawai</p> <p>b. Telah dilakukan <i>assessment</i> kepada sebagian besar pegawai</p> <p>c. Telah dilakukan <i>assessment</i> kepada sebagian kecil pegawai</p> <p>d. Belum dilakukan <i>assessment</i> pegawai</p>	B	0.67	Laporan Asesor kepada Ka.BKD Kota Yk perihal susunan hasil Pelaksanaan Asesmen Psikologis Tahun 2004 s/d 2014 Pegawai yang mengikuti <i>Assesment</i> : Tahun 2004 s/d 2014 sebanyak 1165 orang - Surat Ka.BKD No x 812 / 021 tanggal 20 Januari 2016 perihal : Laporan Hasil Asesmen Psikologis Tahun 2015 - Surat Ka.BKD No x 893 / 080 tanggal 15 Maret 2016 perihal : Laporan Hasil Asesmen Psikologis Tahun 2015 Pegawai yg mengikuti <i>asesmen</i> Tahun 2015 Sebanyak 75 orang dan 87 orang Rencana tahun 2016 : 140 orang ( Sudah Dilaksanakan 2 angkatan ) Nama, NIP dan jabatan pegawai yang telah mengikuti <i>assessment</i> termuat didalam Surat Laporan Hasil Asesmen
	c	Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi	<p>a. Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi kepada seluruh pegawai</p> <p>b. Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi kepada sebagian besar pegawai</p> <p>c. Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi kepada sebagian kecil pegawai</p> <p>d. Belum dilakukan identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai</p>	A	1	Dokumen Analisa Kebutuhan Diklat dan DPA; Jumlah jenis diklat 20 jenis; proyeksi jumlah peserta 1225 orang 2016; jumlah anggaran Rp 2.954.951.000 Peningkatan Kualifikasi Pendidikan Tahun 2016 bagi Peserta Tugas Belajar sebanyak 42 orang Rp 628.820.000 29 Jenis Diklat dari Tahun 2012 – 2016, yang merepresentasikan 29 jenis kompetensi, diklat harus ada jenis-jenis kompetensi yang dibutuhkan Pemkot
	d	Telah disusun rencana pengembangan kompetensi dengan dukungan anggaran yang mencukupi	<p>a. Telah disusun rencana pengembangan kompetensi seluruh pegawai dengan dukungan anggaran yang mencukupi</p> <p>b. Telah disusun rencana pengembangan kompetensi sebagian besar pegawai dengan dukungan anggaran yang mencukupi</p> <p>c. Telah disusun rencana pengembangan kompetensi sebagian kecil pegawai dengan dukungan anggaran yang mencukupi</p> <p>d. Belum ada rencana pengembangan kompetensi pegawai</p>	A	1	Dokumen Analisa Kebutuhan Diklat dan DPA; Jumlah jenis diklat 21 jenis; proyeksi jumlah peserta 1225 orang 2016; jumlah anggaran Rp 2.954.951.000 Peningkatan Kualifikasi Pendidikan Tahun 2016 bagi Peserta Tugas Belajar sebanyak 42 orang Rp 628.820.000 Sesuai UU ASN setiap ASN berhak mengikuti peningkatan kompetensi selama 80 jam per tahun.
	e	Telah dilakukan pengembangan pegawai berbasis kompetensi sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi	<p>a. Telah dilakukan pengembangan berbasis kompetensi kepada seluruh pegawai sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi</p> <p>b. Telah dilakukan pengembangan berbasis kompetensi kepada sebagian besar pegawai sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi</p> <p>c. Telah dilakukan pengembangan berbasis kompetensi kepada sebagian kecil pegawai sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi</p> <p>d. Belum ada pengembangan pegawai berbasis kompetensi</p>	B	0.67	Daftar Proyeksi Diklat Tahun 2012 - 2016; Jumlah jenis kompetensi yang dikembangkan 21 jenis; proyeksi jumlah pegawai yang dikembangkan kompetensinya 1225 orang; Tugas Belajar 42 orang

	f	Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi secara berkala	<p>a. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi secara berkala</p> <p>b. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi secara tidak berkala</p> <p>c. Belum ada monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi</p>	A	1		Dokumen hasil monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi secara berkala: Melaksanakan Evaluasi Alumni Diklat 1. Diklat Penyusunan Lakip 2. Diklat Penguatan Pengawas Sekolah 3. Diklat Pengelola Kepegawaian 4. Diklat Pengelola Kegiatan 5. Diklat BKO Trantib Kriteria Monev: 1. Apakah YBS masih menjabat sesuai dengan diklat 2. Apakah sudah menerapkan hasil diklatannya
<b>4. Promosi jabatan dilakukan secara terbuka</b>					5.2	86.6%	
	a	Kebijakan promosi terbuka telah ditetapkan	ya, apabila terdapat kebijakan tentang promosi terbuka dan telah ditetapkan	Ya	1		Dokumen terkait Kebijakan promosi terbuka telah ditetapkan dengan Perwal No 63 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara terbuka dan Perwal No 11 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Perwal No 63 Tahun 2015 tentang tata cara pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara terbuka
	b	Promosi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi telah dilaksanakan	<p>a. Pengisian jabatan pimpinan tinggi (utama, madya dan pratama) telah dilakukan melalui promosi terbuka secara nasional</p> <p>b. Pengisian jabatan pimpinan tinggi (utama, madya dan pratama) telah dilakukan melalui promosi terbuka secara terbatas</p> <p>c. Promosi terbuka jabatan pimpinan tinggi terbatas pada posisi jabatan pimpinan tinggi pratama</p> <p>d. Belum ada promosi terbuka jabatan pimpinan tinggi</p>	C	0.33		Pengumuman Ketua Pansel JPT Pratama No 01/Pansel/III/2016 tanggal 17 Maret 2016 Tentang Seleksi Terbuka JPT Pratama Pemkot Tahun 2016
	c	Promosi terbuka dilakukan secara kompetitif dan obyektif	Ya, apabila pelaksanaan promosi dilakukan dengan cara kompetitif dan penilaian dilakukan secara obyektif	Ya	1		Kriteria dan tatacara Seleksi JPT termuat dlm Pengumuman Ketua Pansel JPT Pratama No 01/Pansel/III/2016 tanggal 17 Maret 2016 Tentang Seleksi Terbuka JPT Pratama Pemkot Tahun 2016
	d	Promosi terbuka dilakukan oleh panitia seleksi yang independen	Ya, apabila telah ditetapkan susunan panitia seleksi yang berasal dari pihak-pihak independen	Ya	1		Kepwal No 434 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Panitia Seleksi JPT Pratama di Pemkot Kepwal No 259 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Panitia Seleksi dan Sekretariat Panitia Seleksi JPT Pratama Pemkot Yk Tahun 2016 Nama dan Jabatan anggota Tim Seleksi termuat dalam lampiran Kepwal

	e	Hasil setiap tahapan seleksi diumumkan secara terbuka	Ya, apabila tahapan diumumkan secara terbuka melalui media IT seperti website panitia seleksi dsb	Ya	1		Tahap2 seleksi; jumlah tahap :ada 3 tahap pengumuman 1. Pengumuman Lowongan JPT Pratama tgl 21 maret 016 s/d 30 maret 016 2. Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi tanggal 4 april 2016 3. Pengumuman Hasil Seleksi Terbuka tanggal 27 April 2016
<b>5. Penetapan kinerja individu</b>					1.07	53.57%	
	a	Penerapan Penetapan kinerja individu	a. Penerapan penetapan kinerja individu telah dilakukan terhadap seluruh pegawai b. Penerapan penetapan kinerja individu telah dilakukan terhadap sebagian besar pegawai c. Penerapan penetapan kinerja individu telah dilakukan terhadap sebagian kecil pegawai d. Belum ada penerapan penetapan kinerja individu yang telah dilakukan	A	1		Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 17 / Kep /2014 tentang Pejabat Penilai Dan Atasan Pejabat Penilai Dalam Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai dan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kota Yogyakarta
	b	Terdapat penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi	a. Seluruh pegawai telah melakukan penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi b. Sebagian besar pegawai telah melakukan penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi c. Sebagian kecil pegawai telah melakukan penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi d. Belum ada pegawai yang melakukan penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi	A	1		Naskah dinas yang memuat kebijakan dan atau prosedur penerapan penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi (SKP) Surat Edaran Sekda Nomor 863/2/SE/2014 tanggal 8 Januari 2014 dan SE Sekda Nomor 863/21/SE/2015 tanggal 25 Februari 2015
	c	Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level di atasnya	a. Seluruh pegawai telah memiliki ukuran kinerja individu yang sesuai dengan indikator kinerja individu di atasnya b. Sebagian besar pegawai telah memiliki ukuran kinerja individu yang sesuai dengan indikator kinerja individu di atasnya c. Sebagian kecil pegawai telah memiliki ukuran kinerja individu yang sesuai dengan indikator kinerja individu di atasnya d. Seluruh pegawai belum memiliki ukuran kinerja individu yang sesuai dengan indikator kinerja individu di atasnya	D	0		Naskah dinas/dokumen hasil evaluasi kesesuaian ukuran kinerja individu dengan indikator kinerja individu di atasnya; prosentase yang memiliki ukuran yang sesuai Menunggu E-Kinerja
	d	Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik	a. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara bulanan b. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara triwulanan c. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara semesteran d. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara tahunan e. Pengukuran kinerja individu belum dilakukan	D	0.25		Naskah dinas kebijakan/prosedur mengenai Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik; nomor, tanggal Naskah dinas : - Periodisasi Penilaian Kinerja Pegawai setiap Semester Sekali berdasarkan Perwal No 23 tahun 2007 tentang Penilaian Kinerja Pegawai - Periodisasi Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Setahun sekali berdasarkan PP 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai - Rekapitulasi Nilai Penilaian Kinerja Pegawai Semester I tahun 2015 Pengukuran secara Tahunan

	e	Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja individu.		<p>a. telah dilakukan monev atas pencapaian kinerja individu secara berkala</p> <p>b. telah dilakukan monev atas pencapaian kinerja individu secara tidak berkala</p> <p>c. Belum ada monev pencapaian kinerja individu</p>	B	0.5		Naskah dinas kebijakan/prosedur/hasil monev atas pencapaian kinerja individu; nama, nomor dan tanggal naskah dinas berupa : Rangkuman Monev PP 46 tahun 2011 Untuk Tahun 2014 yang dibuat Awal tahun 2015, dibuat oleh Tim Monev SKP, isinya penyamaan persepsi SKP
	f	Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu		<p>a. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu terhadap seluruh pegawai</p> <p>b. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu terhadap sebagian besar pegawai</p> <p>c. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu terhadap sebagian kecil pegawai</p> <p>d. Hasil penilaian kinerja individu belum dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu terhadap seluruh pegawai</p>	A	1		Aturan persyaratan Proses Kenaikan Pangkat (JFU, JFT maupun JS)
	g	Capaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian tunjangan kinerja		<p>a. Capaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian tunjangan kinerja kepada seluruh pegawai</p> <p>b. Capaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian tunjangan kinerja kepada sebagian besar pegawai</p> <p>c. Capaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian tunjangan kinerja kepada sebagian kecil pegawai</p> <p>d. Capaian kinerja individu belum dijadikan dasar untuk pemberian tunjangan kinerja kepada seluruh pegawai</p>	D	0		Naskah dinas kebijakan/prosedur/Hasil Capaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Perwal Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Pemkot Yk dan Perwal Nomor 2 tahun 2016 tentang Perubahan atas Perwal Nomor 43 Tahun 2015 Berlaku bagi BLUD, UPT Pusat Bisnis, Taman Pintar, sudah memberlakukan sbg dasar pemberian remunerasi
<b>6. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai</b>						0.75	75%	
	a	Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah ditetapkan		ya, apabila terdapat kebijakan tentang disiplin/kode etik/kode perilaku	Ya	1		Naskah dinas kebijakan/prosedur/hasil tentang disiplin/kode etik/kode perilaku; Peraturan Walikota Yk Nomor 76 Th 2004 ttg Penetapan Kode Etik Pemerintah Kota Yk dan Surat Edaran Nomor: 863 / 74 / SE / 2011 tentang Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta; Workshop Pemeriksaan Atasan Langsung bagi 400 pejabat structural/setara eselon II s.d. eselon V .

	b	Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah diimplementasikan	a. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah diimplementasikan kepada seluruh unit organisasi b. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah diimplementasikan kepada sebagian besar unit organisasi c. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah diimplementasikan kepada sebagian kecil unit organisasi d. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi belum diimplementasikan kepada seluruh unit organisasi	A	1		Naskah dinas kebijakan/prosedur/hasil tentang disiplin/kode etik/kode perilaku; Peraturan Walikota Yk Nomor 76 Th 2004 ttg Penetapan Kode Etik Pemerintah Kota Yk dan Surat Edaran Nomor: 863 / 74 / SE / 2011 tentang Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta; Workshop Pemeriksaan Atasan Langsung bagi 400 pejabat structural/setara eselon II s.d. eselon V .
	c	Adanya monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi	a. Adanya monev atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi secara berkala b. Adanya monev atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi tidak berkala c. Belum ada monev atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi	A	1		Naskah dinas kebijakan/prosedur/hasil tentang monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku; nama, nomor dan tanggal naskah dinas Dilaksanakan oleh masing – masing atasan langsung Revisi Perwal mewajibkan monev kode etik dan perilaku dan Membuat regulasi untuk mewujudkan monev atas pelaksanaan aturan disiplin Kode Etik dan Aturan Perilaku ; Program Kerja Pengawasan Tahunan; Dokumen penilaian perilaku tiap semester"
	d	Adanya pemberian sanksi dan imbalan ( <i>reward</i> )	a. Adanya pemberian sanksi dan imbalan ( <i>reward</i> ) kepada seluruh unit organisasi b. Adanya pemberian sanksi dan imbalan ( <i>reward</i> ) kepada sebagian besar unit organisasi c. Adanya pemberian sanksi dan imbalan ( <i>reward</i> ) kepada sebagian kecil unit organisasi d. Belum ada pemberian sanksi dan imbalan ( <i>reward</i> ) kepada unit organisasi	D	0		Belum ada data terkait penerapan <i>reward</i> dan punishment untuk skala unit organisasi
<b>7. Pelaksanaan evaluasi jabatan</b>					1	100%	
	a	Informasi faktor jabatan telah disusun	Ya, apabila terdapat dokumen tentang penyusunan Faktor Jabatan	Ya	1		Surat Walikota Yk kepada Men PAN Nomor 800/3939 tanggal 5 November 2015 perihal Usulan Validasi Hasil Evaluasi Jabatan
	b	Peta jabatan telah ditetapkan	a. Seluruh unit organisasi telah menetapkan peta jabatan b. Sebagian besar unit organisasi telah menetapkan peta jabatan c. Sebagian kecil unit organisasi telah menetapkan peta jabatan d. Seluruh unit organisasi belum menetapkan peta jabatan	A	1		Peta jabatan telah ditetapkan dalam dokumen Hasil Analisis Jabatan setiap SKPD berupa Kepwal/draft kepwal hasil anjab 48 SKP.
	c	Kelas jabatan telah ditetapkan	a. Seluruh unit organisasi telah menetapkan kelas jabatan b. Sebagian besar unit organisasi telah menetapkan kelas jabatan c. Sebagian kecil unit organisasi telah menetapkan kelas jabatan d. Seluruh unit organisasi belum menetapkan kelas jabatan	A	1		Surat Walikota Yk kepada Men PAN Nomor 800/3939 tanggal 5 November 2015 perihal Usulan Validasi Hasil Evaluasi Jabatan
<b>8. Sistem Informasi Kepegawaian</b>					1	100%	

	a	Sistem informasi kepegawaian telah dibangun sesuai kebutuhan	Ya, apabila terdapat sistem informasi yang dibangun sesuai dengan kebutuhan	Ya	1		Printscreen SIMPEG dan SIM Presensi; jumlah jenis layanan/fitur 5 (sesuai jumlah layanan dalam manajemen SDM) Daftar Urut Kepangkatan ( DUK ), Rekapitulasi, Nominatif, Daftar Riwayat Pekerjaan, grafik
	b	Sistem informasi kepegawaian dapat diakses oleh pegawai	Ya, apabila pegawai dapat mengakses sistem informasi kepegawaian	Ya	1		Peraturan Walikota Yk Nomor 58 Th 2012 ttg Pedoman Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Pemerintah Kota Yk.
	c	Sistem informasi kepegawaian terus dimutakhirkan	a. Seluruh unit organisasi terus memutakhirkan Sistem Informasi Kepegawaian b. Sebagian besar unit organisasi terus memutakhirkan Sistem Informasi Kepegawaian c. Sebagian kecil unit organisasi terus memutakhirkan Sistem Informasi Kepegawaian d. Seluruh unit organisasi belum memutakhirkan Sistem Informasi Kepegawaian	A	1		Naskah dinas kebijakan/prosedur/hasil tentang Pemutakhiran Sistem Informasi Kepegawaian; Peraturan Walikota Yk Nomor 58 Th 2012 ttg Pedoman Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Pemerintah Kota Yk, periodisasi pemutakhiran setiap hari dan dilaksanakan koordinasi / monev dengan operator Simpeg setiap bulan sekali
	d	Sistem informasi kepegawaian digunakan sebagai pendukung pengambilan kebijakan manajemen SDM	Ya, apabila sistem informasi kepegawaian digunakan sebagai pendukung pengambilan kebijakan manajemen SDM	Ya	1		Penerbitan SK Pengangkatan Jabatan Struktural / Fungsional Penerbitan SK Penataan pegawai Penerbitan SK Kenaikan Pangkat Penerbitan SK Pensiun dll
	<b>Rencana Aksi</b>		1. Memperluas cakupan assesment kompetensi pegawai pada seluruh pegawai 2. Menyusun perencanaan pengembangan kompetensi pegawai berdasar hasil assesment 3. menyempurnakan sistem pengukuran kinerja individu 4. Menerapkan pemberian reward dan punishment atas hasil penilaian kinerja individu				
<b>VI. Penguatan Akuntabilitas</b>						5.74	95.6%
<b>1. Keterlibatan pimpinan</b>						2	100%
	a	Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra	a. Seluruh pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra b. Sebagian besar pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra c. Sebagian kecil pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra d. Seluruh pimpinan belum terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra	A	1		Dokumen renstra, notulen daftar hasil koord penyusunan renstra
	b	Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja	a. Seluruh pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja b. Sebagian besar pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja c. Sebagian kecil pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja d. Seluruh pimpinan belum terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja	A	1		Dokumen penetapan kinerja, notulen daftar hasil koord penyusunan penetapan kinerja

	c	Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala	a. Seluruh pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala b. Sebagian besar pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala c. Sebagian kecil pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala d. Seluruh pimpinan belum memantau pencapaian kinerja secara berkala	A	1		Laporan tribulanan pengukuran kinerja
<b>2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja</b>					3.74	93.4%	
	a	Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja	a. Seluruh unit organisasi berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja b. Sebagian besar unit organisasi berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja c. Sebagian kecil unit organisasi berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja d. Seluruh unit organisasi belum berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja	A	1		Pendampingan penyusunan lakip, mengirim peserta/sdm untuk diklat lakip
	b	Apakah pedoman akuntabilitas kinerja telah disusun	Ya, apabila terdapat dokumen pedoman akuntabilitas kinerja	Ya	1		Perwal Kota YK No.2 Tahun 2015
	c	Sistem Pengukuran Kinerja telah dirancang berbasis elektronik	a. Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik sudah terimplementasi dan terintegrasi b. Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik sudah terimplementasi tapi belum terintegrasi c. Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik dalam pengembangan tp belum implementasi d. Belum ada Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik	B	0.67		Printscreen SIM E-lakip
	d	Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh seluruh unit	a. Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh seluruh unit organisasi b. Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh sebagian besar organisasi c. Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh sebagian kecil organisasi d. Sistem pengukuran kinerja belum dapat diakses oleh unit organisasi	A	1		sistem E-lakip
	e	Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara berkala	a. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara bulanan b. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara triwulanan c. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara semesteran d. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara tahunan e. Pemutakhiran data kinerja belum dilakukan	A	1		Laporan bulanan
<b>Rencana Aksi</b>			1. Penyempurnaan e-lakip terintegrasi dengan SIM lainnya 2. Mempercepat pelaksanaan Cascading perencanaan daerah				
<b>VII. Penguatan Pengawasan</b>					10.43	86.89%	
<b>1. Gratifikasi</b>					1.35	90%	
	a	Telah terdapat kebijakan penanganan gratifikasi	Ya, apabila telah ditetapkan kebijakan tentang penanganan gratifikasi	Ya	1		Perwal Yk no 82 th 2013 ttg Pedoman Pengendalian Gratifikasi
	b	Telah dilakukan public campaign	a. Public campaign telah dilakukan secara berkala b. Public campaign dilakukan tidak secara berkala c. Belum dilakukan public campaign	B	0.5		Sosialisasi Perwal Yk No.82 Th.2013 pada tanggal 12 November 2015; permintaan sosialisasi pencegahan korupsi sepanjang tahun 2015 dari unit kerja /SKPD
	c	Penanganan gratifikasi telah diimplementasikan	Ya, apabila UPG melaporkan secara berkala tentang praktik gratifikasi	Ya	1		Kepwal Yk No.178 Th.2015 lampiran 5 dan 6; Dokumen laporan gratifikasi
	d	Telah dilakukan evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi	Ya, apabila terdapat evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi	Ya	1		Dokumen hasil evaluasi implementasi kebijakan pedoman pengendalian gratifikasi
	e	Hasil evaluasi atas penanganan gratifikasi telah ditindaklanjuti	Ya, apabila terdapat laporan tindak lanjut	Ya	1		Dokumen laporan tindak lanjut penanganan gratifikasi
<b>2. Penerapan SPIP</b>					1.5	100%	

	a	Telah terdapat peraturan Pimpinan organisasi tentang SPIP	Ya, apabila ada peraturan pimpinan organisasi tentang SPIP	Ya	1		Keputusan Walikota No. 482 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP, Perwal No.61 Th.2010 tentang Penyelenggaraan SPIP
	b	Telah dibangun lingkungan pengendalian	a. Seluruh organisasi telah membangun lingkungan pengendalian b. Sebagian organisasi telah membangun lingkungan pengendalian c. Seluruh organisasi belum membangun lingkungan pengendalian	A	1		Kepwal Yk no 76 tahun 2004 ttg Kode Etik Pegawai, Perwal Yk No 39 tahun 2012 ttg Penyusunan SOP Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemkot Yk, Dibentuk satgas SPIP Pemkot Yk dan satgas SPIP di seluruh SKPD
	c	Telah dilakukan penilaian risiko atas organisasi	a. Seluruh organisasi telah melaksanakan penilaian risiko b. Sebagian besar organisasi telah melaksanakan penilaian risiko c. Sebagian kecil organisasi telah melaksanakan penilaian risiko d. Seluruh organisasi belum melaksanakan penilaian risiko	A	1		Dokumen hasil penilaian risiko ; Dokumen hasil monev SPIP Th 2015
	d	Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi	a. Seluruh organisasi telah melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi b. Sebagian besar organisasi telah melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi c. Sebagian kecil organisasi telah melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi d. Seluruh organisasi belum melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi	A	1		Dokumen Hasil Monev 2015
	e	SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait	a. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait b. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada sebagian besar pihak terkait c. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada sebagian kecil pihak terkait d. Belum ada pihak terkait yang mendapatkan informasi dan komunikasi mengenai SPI	A	1		Sosialisasi PP no 60 th 2008 pada seluruh pegawai di lingkungan Pemkot Yk, audit SPI pada setiap pemeriksaan reguler
	f	Telah dilakukan pemantauan pengendalian intern	a. Sistem pengendalian intern dimonitoring dan evaluasi secara berkala b. Sistem pengendalian intern dimonitoring dan evaluasi tidak secara berkala c. Belum ada monitoring dan evaluasi terhadap sistem pengendalian intern	A	1		Laporan Monev Tahunan dan Triwulanan ; LHP Reguler
<b>3. Pengaduan Masyarakat</b>					<b>2</b>	<b>100%</b>	
	a	Telah disusun kebijakan pengaduan masyarakat	Ya, apabila telah ditetapkan kebijakan tentang penanganan pengaduan	Ya	1		Perwal Yk No 38 th 2009 ttg Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat
	b	Penanganan pengaduan masyarakat telah diimplementasikan	a. Seluruh unit organisasi mengimplementasikan penanganan pengaduan masyarakat b. Sebagian besar unit organisasi mengimplementasikan penanganan pengaduan masyarakat c. Sebagian kecil unit organisasi mengimplementasikan penanganan pengaduan masyarakat d. Seluruh unit organisasi belum mengimplementasikan penanganan pengaduan masyarakat	A	1		SOP Unit Pengelola Informasi dan Keluhan, SOP Penelitian dan Penelaahan
	c	Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti	a. Seluruh hasil penanganan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti b. Sebagian besar Hasil penanganan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti c. Sebagian kecil Hasil penanganan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti d. Seluruh hasil penanganan pengaduan masyarakat belum ditindaklanjuti	A	1		Laporan bulanan Pengaduan melalui UPIK dan Laporan bulanan PPI tahun 2015
	d	Telah dilakukan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	a. Penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring dan evaluasi secara berkala b. Penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring dan evaluasi tidak secara berkala c. Penanganan pengaduan masyarakat belum dimonitoring dan dievaluasi	A	1		Dokumen hasil monev penanganan pengaduan, koordinasi berkala kemajuan PPI th 2015
	e	Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti	Ya, apabila terdapat laporan hasil evaluasi atas tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat	Ya	1		Laporan tindak lanjut hasil evaluasi

4. Whistle-Blowing System					0.7	46.6%	
	a	Telah terdapat Whistle Blowing System	Ya, apabila terdapat kebijakan tentang Whistle Blowing System	Ya	1		Draft Perwal WBS dan System WBS di Web WBS.Jogjakota.go.id
	b	Whistle Blowing System telah disosialisasikan	a. Whistle blowing system disosialisasikan ke seluruh organisasi b. Whistle blowing system disosialisasikan ke sebagian besar organisasi c. Whistle blowing system disosialisasikan ke sebagian kecil organisasi d. Whistle blowing system belum disosialisasikan ke seluruh organisasi	C	0.33		Whistle blowing system belum disosialisasikan ke seluruh organisasi baru sebagian kecil : pada forum koordinasi, konsultasi, pelaksanaan audit
	c	Whistle Blowing System telah diimplementasikan	Ya, apabila kebijakan whistle blowing system telah diimplementasikan	Ya	1		Print sscreen WBS
	d	Telah dilakukan evaluasi atas Whistle Blowing System	a. Whistle Blowing System dimonitoring dan evaluasi secara berkala b. Whistle Blowing System dimonitoring dan evaluasi tidak secara berkala c. Belum ada monitoring dan evaluasi Whistle Blowing System	C	0		Belum ada monitoring dan evaluasi Whistle Blowing System
	e	Hasil evaluasi atas Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti	a. Seluruh Hasil evaluasi atas Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti b. Sebagian besar Hasil evaluasi atas Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti c. Sebagian kecil Hasil evaluasi atas Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti d. Seluruh Hasil evaluasi atas Whistle Blowing System belum ditindaklanjuti	D	0		belum ada bukti dukung
5. Penanganan Benturan Kepentingan					1.25	83.4%	
	a	Telah terdapat Penanganan Benturan Kepentingan	Ya, apabila terdapat peraturan/kebijakan Penanganan Benturan Kepentingan	Ya	1		Perwal Yk No.17 Th.2015 tentang pengaturan benturan kepentingan di Pemkot Yogyakarta
	b	Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan	a. Penanganan Benturan Kepentingan disosialisasikan ke seluruh unit organisasi b. Penanganan Benturan Kepentingan disosialisasikan ke sebagian besar unit organisasi c. Penanganan Benturan Kepentingan disosialisasikan ke sebagian kecil unit organisasi d. Penanganan Benturan Kepentingan belum disosialisasikan ke seluruh unit organisasi	A	1		Sosialisasi ke seluruh SKPD (daftar hadir, notulen)
	c	Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan	Ya, apabila Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan	Ya	1		SKPD membuat identifikasi benturan kepentingan
	d	Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan	a. Penanganan Benturan Kepentingan dimonitoring dan evaluasi secara berkala b. Penanganan Benturan Kepentingan dimonitoring dan evaluasi tidak secara berkala c. Penanganan Benturan Kepentingan belum dimonitoring dan evaluasi	B	0.5		Dokumen hasil evaluasi implementasi kebijakan pengaturan benturan kepentingan
	e	Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti	a. Seluruh Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti b. Sebagian besar Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti c. Sebagian kecil Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti d. Seluruh Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan belum ditindaklanjuti	B	0.67		Dokumen tindak lanjut hasil evaluasi
6. Pembangunan Zona Integritas					2.25	90%	
	a	Telah dilakukan penancangan zona integritas	Ya, apabila terdapat Dokumen Penancangan Zona Integritas ditandatangani sesuai ketentuan	Ya	1		Dokumen penancangan ZI tgl 12 Juli 2012
	b	Telah ditetapkan unit yang akan dikembangkan menjadi zona integritas	Ya, apabila ada Surat Keputusan Tentang unit yang ditetapkan	Ya	1		Penunjukan 9 SKPD sebagai sampling dengan Keputusan Walikota Yogyakarta No. 318 Tahun 2016 tanggal 21 April 2016 ttt Penetapan SKPD/Unit Kerja Dalam Rangka Membangun Zona Integritas menuju WBK dan WBBM Pemkot Yk

	c	Telah dilakukan pembangunan zona integritas	a. Pembangunan zona integritas dilakukan secara intensif b. Pembangunan zona integritas dilakukan tidak secara intensif c. Belum ada pembangunan zona integritas	A	1		Workshop ZI, laporan gratifikasi semester I dan II Tahun 2015, pendampingan terhadap SKPD sampling
	d	Telah dilakukan evaluasi atas zona integritas yang telah ditentukan	a. Zona integritas yang telah ditentukan dimonitoring dan dievaluasi secara berkala b. Zona integritas yang telah ditentukan dimonitoring dan dievaluasi tidak secara berkala c. Zona integritas yang telah ditentukan belum dimonitoring dan dievaluasi	A	1		Dokumen hasil evaluasi/ penilaian ZI th 2015
	e	Telah terdapat unit kerja yang ditetapkan sebagai "menuju WBK/WBBM"	a. Telah terdapat unit kerja yang berpredikat menuju WBBM b. Telah terdapat unit kerja yang berpredikat menuju WBK c. Belum terdapat unit kerja yang berpredikat menuju WBK	B	0.5		Telah ada 2 SKPD yaitu Dinas Perizinan dan Kantor Pengelolaan Taman Pintar yang mendapat penghargaan dari KemenPAN RB sebagai berpredikat WBK berdasarkan Keputusan Menpan dan RB No..... Th.....
<b>7. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)</b>					1.38	91.75%	
	a	Rekomendasi APIP didukung dengan komitmen pimpinan	a. Seluruh rekomendasi yang memerlukan komitmen pimpinan telah ditindaklanjuti dalam 2 tahun terakhir b. Sebagian rekomendasi yang memerlukan komitmen pimpinan telah ditindaklanjuti dalam 2 tahun terakhir c. Sebagian kecil rekomendasi yang memerlukan komitmen pimpinan telah ditindaklanjuti dalam 2 tahun terakhir d. Seluruh rekomendasi yang memerlukan komitmen pimpinan belum ditindaklanjuti dalam 2 tahun terakhir	A	1		Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan th 2015
	b	APIP didukung dengan SDM yang memadai secara kualitas dan kuantitas.	a. Seluruh fungsi pengawasan internal tertangani oleh SDM yang kompeten baik secara kuantitas maupun kualitas b. Sebagian besar fungsi pengawasan internal tertangani oleh SDM yang kompeten baik secara kuantitas maupun kualitas c. Sebagian kecil fungsi pengawasan internal tertangani oleh SDM yang kompeten baik secara kuantitas maupun kualitas d. Seluruh fungsi pengawasan internal belum tertangani oleh SDM yang kompeten baik secara kuantitas maupun kualitas	A	1		rekapitulasi jumlah SDM, data Diklat , Dokumen penilaian leveling APIP
	c	APIP didukung dengan anggaran yang memadai	a. Seluruh kebutuhan didukung oleh anggaran b. Sebagian besar kebutuhan didukung oleh anggaran c. Sebagian kecil kebutuhan didukung oleh anggaran d. Seluruh kebutuhan belum didukung oleh anggaran	B	0.67		DPA Inspektorat, Laporan hasil kegiatan Inspektorat
	d	APIP berfokus pada client dan audit berbasis risiko	a. Seluruh fungsi pengawasan internal berfokus pada client dan audit berbasis risiko b. Sebagian besar fungsi pengawasan internal berfokus pada client dan audit berbasis risiko c. Sebagian kecil fungsi pengawasan internal berfokus pada client dan audit berbasis risiko d. Seluruh fungsi pengawasan internal belum berfokus pada client dan audit berbasis risiko	A	1		Kepwal No.440 Tahun 2015 ttg Program Kerja Pengawasan Tahunan untuk tahun 2016
	<b>Rencana Aksi</b>		1. menyelesaikan penetapan Perwal WBS 2. Melanjutkan ublic campaign pengendalian gratifikasi dan pencegahan korupsi secara umum 3. Memantau dan mengevaluasi secara berkala penerapan SPIP, pengendalian gratifikasi, WBS, pengaturan benturan kepentingan dan pencegahan korupsi dalam arti luas 4. memantau dan mengevaluasi penangan pengaduan masyarakat				
<b>VIII. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK</b>					5.79	96.5%	
<b>1. Standar Pelayanan</b>					0.9	90%	
	a	Terdapat kebijakan standar pelayanan	Ya, apabila telah terdapat kebijakan standar pelayanan yang mencakup kejelasan biaya, waktu, persyaratan perijinan	Ya	1		rekapitulasi SPP Pemkot Yogyakarta tahun 2016

	b	Standar pelayanan telah dimaklumkan	a. Standar pelayanan telah dimaklumkan pada seluruh jenis pelayanan b. Standar pelayanan telah dimaklumkan pada sebagian besar jenis pelayanan c. Standar pelayanan telah dimaklumkan pada sebagian kecil jenis pelayanan d. Standar pelayanan belum dimaklumkan pada seluruh jenis pelayanan	A	1		rekapitulasi SPP Pemkot Yogyakarta tahun 2016
	c	Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan	a. Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan pada seluruh jenis pelayanan b. Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan pada sebagian besar jenis pelayanan c. Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan pada sebagian kecil jenis pelayanan d. Belum terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan	A	1		rekapitulasi SOP Pemkot Yk
	d	Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan	a. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan secara berkala dan dilakukan dengan melibatkan stakeholders b. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan secara tidak berkala dan/atau tidak dengan melibatkan stakeholders c. Belum dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan	B	0.5		hasil Review Kec. Danurejan, Kec. Umbulharjo, Dinas Perizinan
	e	Dilakukan reviu dan perbaikan atas SOP	a. Dilakukan reviu dan perbaikan SOP secara berkala b. Dilakukan reviu dan SOP secara tidak berkala c. Belum ada reviu dan perbaikan SOP	A	1		Dokumen evaluasi dan monitorin SOP
<b>2. Budaya Pelayanan Prima</b>					1	100%	
	a	Telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima (contoh: kode etik, estetika, capacity building, pelayanan prima)	a. Seluruh sosialisasi/pelatihan telah dilakukan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima b. Sebagian besar sosialisasi/pelatihan telah dilakukan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima c. Sebagian kecil sosialisasi/pelatihan telah dilakukan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima d. Seluruh sosialisasi/pelatihan belum dilakukan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima	A	1		Laporan kegiatan (forkompanda, sosialisasi budayakerja, workshop pelayanan publik, workshop PPK BLUD)
	b	Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media	a. Informasi pelayanan dapat diakses melalui berbagai media (misal: papan pengumuman, website, media sosial, media cetak, media televisi, radio dsb) b. Informasi pelayanan dapat diakses melalui beberapa media (misal: papan pengumuman, selebaran, dsb) c. Informasi pelayanan sulit diakses melalui berbagai media	A	1		jogjakota.go.id, media cetak info kota, dialog interaksi di TV lokal dan acara radio Walikota Menyapa setiap senin dan kamis, info layanan di setiap unit layanan pada papan informasi, banner, leaflet
	c	Telah terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar	a. Telah terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar dan sudah diimplementasikan b. Telah terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar ada namun belum diimplementasikan c. Belum terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar	A	1		Perda Pelayanan Publik, Perwal juklak pelayanan publik, ISSO, Citizen Charter
	d	Telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi	a. Apabila seluruh pelayanan sudah dilakukan secara terpadu b. Apabila sebagian besar pelayanan sudah dilakukan secara terpadu c. Apabila sebagian kecil pelayanan sudah dilakukan secara terpadu d. Apabila tidak ada pelayanan yang dilakukan secara terpadu	A	1		Perwal nomor 14 tahun 2016 tentang penyelenggaraan perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta, perizinan yang terpadu pada dinas perizinan, pelayanan di Dinsosnakertrans dalam 1 atap, PATEN di Kecamatan, pelayanan di Dindukcapil, pelayanan di Dinas Kesehatan

	e	Terdapat inovasi pelayanan	Ya, apabila terdapat bukti inovasi pelayanan yang diciptakan dan bermanfaat bagi penerima pelayanan	Ya	1		Rumah Sehat Lansia, Bank Buku, Taman Pintar, Rumah Pemulihan Gizi, Gerai Investasi, Yogyakarta Emergency Service (YES), inovasi layanan perizinan pada Dinas Perizinan, Layanan TAMARA (Taman Masyarakat Sambung Rasa (Kantor Arpusda), Menuai rupiah dari bank sampah (BLH), Ensiklotepi (KPTP), SiP TeMAN Bikin oreang tidak lelah (RSUD), Pelayanan E Mobile KTP Elektronik (Dindukcapil), Penerangan Jalan Umum Hemat Energi di tingkat RT-RW (PJU Lingkungan) Dinas Kimpraswil, SIMBARA (DBGAD), Program MO-EXC Sederhana Manfaat Instimewa, Stikerisasi fasilitas sarana kesehatan mewujudkan masyarakat cerdas, promosi kesehatan di masjid dan mushola, psikologi di Puskesmas (Dinas Kesehatan)
<b>3. Pengelolaan Pengaduan</b>					1.5	100%	
	a	Terdapat media pengaduan pelayanan	Ya, apabila telah ditetapkan media pengaduan pelayanan secara jelas dan terbuka	Ya	1		website upik.jogjakota.go.id, kotak aduan di setiap unit layanan, sms 08122780001
	b	Terdapat SOP pengaduan pelayanan	a. Terdapat SOP pengaduan pelayanan secara komprehensif b. Terdapat SOP pengaduan pelayanan namun belum seluruhnya c. Belum ada SOP pengaduan pelayanan	A	1		SOP UPIK dan PPI
	c	Terdapat unit yang mengelola pengaduan pelayanan	ya, apabila telah ditetapkan unit pengelola pengaduan	Ya	1		Perwal ttg Unit Pengelola Informasi dan Keluhan,
	d	Telah dilakukan tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan	a. Telah dilakukan tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan b. Telah dilakukan tindak lanjut atas sebagian besar pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan c. Telah dilakukan tindak lanjut atas sebagian kecil pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan d. Belum dilakukan tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan	A	1		SOP UPIK; Dokumen hasil pemantauan tindak lanjut pengaduan
	e	Telah dilakukan evaluasi atas penanganan keluhan / masukan	a. Evaluasi atas penanganan keluhan / masukan dilakukan secara berkala b. Evaluasi atas penanganan keluhan / masukan dilakukan tidak berkala c. Belum ada evaluasi penanganan keluhan / masukan	A	1		Dokumen evaluasi atas penanganan keluhan dan aduan
<b>4. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan</b>					1.5	100%	
	a	Dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	a. Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan secara berkala b. Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan tidak berkala c. Belum ada survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	A	1		rekapitulasi hasil pengukuran IKM dan Indeks Kepuasan Pengguna Layanan
	b	Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka	Ya, apabila tersedia media untuk mengakses data hasil survey dengan mudah	Ya	1		jogjakota.go.id di bagian Tautan lalu dapat klik di IKM 2015 dan papan informasi di masing-masing SKPD/unit kerja
	c	Dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat	a. Dilakukan tindak lanjut atas seluruh hasil survey kepuasan masyarakat b. Dilakukan tindak lanjut atas sebagian besar hasil survey kepuasan masyarakat c. Dilakukan tindak lanjut atas sebagian kecil hasil survey kepuasan masyarakat d. Belum dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat	A	1		Notulen koordinasi tindak lanjut hasil survei

5. Pemanfaatan Teknologi Informasi				0.89	89%	
a	Telah memiliki rencana penerapan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan	Ya, apabila ada rencana penerapan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan	Ya	1		Perwal 15 tahun 2015 tentang E-Gov
b	Telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan	a. Seluruh pelayanan telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan b. Sebagian besar pelayanan telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan c. Sebagian kecil pelayanan telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan d. Seluruh pelayanan belum menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan	B	0.67		perizinan lewat perizinan.jogjakota.go.id, Pajak Bumi Bangunan lewat atm perbankan, akte on line,
c	Telah dilakukan perbaikan secara terus menerus	a. Perbaikan dilakukan secara terus-menerus b. Perbaikan dilakukan tidak secara terus menerus c. Belum dilakukan perbaikan	A	1		Dokumen hasil monitoring dan evaluasi TI pelayanan
<b>Rencana Aksi</b>		1. Telah direncanakan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan secara berkala dan/atau dengan melibatkan stakeholders pada tahun 2017 (Renja SKPD 2017) dan Monev SPP secara berkala 2. sosialisasi/pelatihan berkelanjutan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima (DPA 2016 dan Renja 2017) 3. Integrasi sistem informasi sejak perencanaan sampai dengan pelaporan; ; memperluas layanan yang didukung TI				
<b>B.HASIL</b>				<b>29.33</b>	<b>73.32%</b>	
<b>I. KAPASITAS DAN AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI</b>				<b>14.02</b>	<b>70.08%</b>	
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Diisi dengan nilai hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) (0 - 100)	70.11	9.82		Surat Menpan dan RB No. B/355/D.I PAN RB/01/2016 tanggal 20 Januari 2016
2.	Nilai Kapasitas Organisasi (Survei Internal)	Diisi dengan nilai hasil Survei Internal Kapasitas Organisasi (0 - 5)	3.5	4.2		Dokumen penilaian Spekop
<b>Rencana Aksi</b>		1. Meningkatkan sistem AKIP. 2. Melakukan survey internal secara berkelanjutan untuk menilai kapasitas organisasi				
<b>II. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN</b>				<b>7.59</b>	<b>75.93%</b>	
1.	Nilai Persepsi Korupsi (Survei Eksternal)	Diisi dengan nilai hasil Survei Eksternal atas Persepsi Korupsi (0 - 4)	2.91	5.0925		Hasil survey integritas sektor publik tahun 2013 oleh Direktorat Litbang KPK RI
2.	Opini BPK	Wajar Tanpa Pengecualian WTP-Dengan Paragraph Penjelas Wajar Dengan Pengecualian Tidak Memberikan Pendapat Tidak Wajar Tidak Memiliki Laporan Keuangan	WTP-Dengan Paragraph Penjelas	2.5		LHP BPK Perwakilan DIY Nomor 158/LHP/XVII.YOG/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 atas audit Laporan Keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2014
<b>Rencana Aksi</b>		1. bekerja sama dengan lembaga independen / permohonan kepada KPK untuk dilakukan survey menilai IPK 2. meningkatkan tata kelola keuangan dan barang agar dicapai opini WTP tanpa Paragraf Penjelas.				
<b>III. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK</b>				<b>7.72</b>	<b>77.21%</b>	
1.	Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal)	Diisi dengan Nilai Hasil Survei Eksternal Kualitas Pelayanan (0 - 4)	3.0884	7.721		IKM SKPD Pelayanan Publik Tahun 2015.
<b>Rencana Aksi</b>		Meningkatkan nilai persepsi kualitas pelayanan terhadap SKPD pelayanan publik dengan mengevaluasi thd hasil penilaian yg masih kurang.				
<b>INDEKS RB (Total)</b>				<b>82.98</b>		

\*) Tahap Penilaian :

1. Masih dalam proses koordinasi penilaian atau perbaikan penilaian di inspektorat
2. Sudah disampaikan ke Ketua Tim RB Instansi
3. Sudah dikirim ke Kementerian PAN dan RB